



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KBPPPA KAB. GRESIK



2
0
2
5

JL. DR. WAHIDIN SH. NO.241 GRESIK
TELP. / FAX : (031) 395 1240



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ABSTRAK

Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Terdapat dua periode perencanaan di tahun 2025 yaitu Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Pada Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 ada 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja utama dan pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 ada 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama. Pada Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 terlihat bahwa Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik berhasil dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagaimana yang telah ditargetkan. Pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 101,81% dengan kategori “Sangat Tinggi” begitupun pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 104,13% dengan kategori “Sangat Tinggi” selanjutnya yaitu capaian anggaran tahun 2025 sebesar 90,49% dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hasil efisiensi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 didapatkan hasil bahwa Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dengan nilai efisiensi pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 sebesar 11,60% dan nilai efisiensi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebesar 12,18%. Pada tahun 2025, anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebesar Rp. 22.453.100.650,75 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70 atau sebesar 90,49%.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Namun disadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga buku Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 27 Februari 2026
Kepala Dinas KB, PP dan PA
Kabupaten Gresik,



dr. Titik Ernawati, M.H.
Pembina Utama Muda (IV-c)
NIP. 19760903 200701 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik.....	3
D. Sistematika Penyusunan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas KBPPPA Gresik	14
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja	20
C. Realisasi Anggaran.	55
BAB IV PENUTUP	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan laporan kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 dan Dokumen Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 dan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2025-2029. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan

/ kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik / saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. GAMBARAN UMUM DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025

1. Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Kedudukan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
2. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Rincian tugas dan fungsi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan, pemetaan perkiraan, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB serta pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan

pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan KB;
- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur kelembagaan atau Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagaimana tertera dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Keluarga Sejahtera dan Advokasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. UPTD P2TP2A; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Personil / Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan dan berkompetensi. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 65 (enam puluh lima) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	19
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	13
3	PPPK Penuh Waktu	5
4	PPPK Paruh Waktu	28
	Total	65

Tabel 1.2

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

No.	Sarana dan Prasarana Yang Digunakan	Jumlah
1.	PC UNIT	34
2.	LAPTOP	7
3.	PRINTER	17
4.	MEJA	72
5.	KURSI	119
6.	KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4	8
7.	KENDARAAN OPERASIONAL RODA 2	96
8	AC	21
	JUMLAH	374

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menempati lahan seluas 750 m² yang terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 241.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025; perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya berdasarkan dokumen Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; Analisis keberhasilan / kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dan upaya / langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja APBD dan PAPBD Tahun 2025, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2025.

Visi tersebut merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2025-2029 yaitu:

“Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2025-2029 adalah :

- 1. Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah**
- 2. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
- 3. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**
- 4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat**
- 5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	1,9–2 kelahiran
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70–76%
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	11,48%
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 2

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92-2 Kelahiran
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	9,27 Persentase (%)
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	5,1 Persentase (%)
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	66,72 Skor Indeks (0-100)
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	30 Persentase (%)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30 Persentase (%)
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,17 Persentase (%)
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	9 Persentase (%)
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persentase (%)
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian

Kinerja APBD Tahun 2025

(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%	10,39%	103,90%	ST
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%	95,65%	110%	ST
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi	Total Fertility Rate (TFR)	1,9–2 kelahiran	1,92 kelahiran	101,54%	ST
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70–76%	65%	89,04%	T

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
	Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	11,48%	9,27*%	110%	ST
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	ST
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	ST
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 2	Level 2	100%	ST
	Rata-rata				101,81%	Sangat Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 101,81% dengan kategori Sangat Tinggi.

Tabel 3.3

**Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian
Kinerja PAPBD Tahun 2025
(Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92-2 Kelahiran	1,92 Kelahiran	102,04%	ST
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	9,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	100%	ST
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	5,1 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	110%	ST
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	KATE-GORI
		Mendapat Layanan Komprehensif				
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	66,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	115,26%	ST
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	30 Persentase (%)	72,73 Persentase (%)	110%	ST
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	110%	ST
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,17 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	110%	ST
6	Meningkatkan akses terhadap	Persentase Usia Kawin	9 Persentase	10.6 Persentase	82,22%	T

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
	layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	(%)	(%)		
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	100%	ST
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	110%	ST
Rata-Rata					104,13%	Sangat Tinggi

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 11 (sebelas) IKU dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) IKU dengan kategori Tinggi. Secara rata-rata capaian kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 104,13% dengan kategori Sangat Tinggi.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat bidang-bidang dan upt sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pengukuran kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2021-2026 melalui 3 (tiga) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 dan Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik periode Tahun 2025-2029 melalui 8 (delapan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja PAPBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2021-2026

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender;
2. Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter;
3. Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus.

Terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2021-2026, realisasi 8 (delapan) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun
Sebelumnya untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	4,21%	2,25%	6,74%	9,55%	10,39%	Meningkat
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi	10,42%	12,75%	19,64%	30,43%	95,65%	Meningkat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI					KETERA-NGAN
			TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	
		dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)						
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	2,03 (Th. 2020)	1,89 (Th. 2021)	1,89 Kelahiran (Th.2021)	1,94 Kelahiran (Th. 2023)	1,92 Kelahiran	Meningkat
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	76,53 (Th. 2020)	78,42% (Th.2021)	78,42% (Th.2021)	67,78%	65%	Menurun
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	15,04 (Th. 2020)	13,65% (Th. 2021)	13,65% (Th. 2021)	9,27%	9,27% (Th. 2024)	Meningkat
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	100%	100%	100%	Tetap
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Meningkat

Dari 8 (delapan) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 2 (dua) indikator dengan realisasi yang tetap dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2021-2025. Penjelasan 8 (delapan) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Indikator yang pertama yaitu Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Upaya membangun kemandirian desa dan menjadikan desa sebagai subjek pembangunan nasional tentu

tidak dapat dipisah dari partisipasi masyarakat. Menurut UU Desa, forum dan ruang bagi partisipasi telah dibuka lebar dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dan musyawarah desa. Melalui Musrenbangdes, perempuan dapat ikut serta mengajukan usulan pembangunan desa, dan menjadi masukan bagi unit pemerintah di atasnya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD-kabupaten/kota) dan RPJMN (nasional).

Merujuk pada penjelasan tersebut, diperoleh hasil perhitungan persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan tahun 2025 sebesar 10,39% yaitu sebanyak 37 desa dari 356 desa yang ada di kabupaten gresik telah mengakomodasi usulan perempuan, dengan target awal yaitu sebesar 10% desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada table 3.3 berikut.

Tabel 3.5

Jumlah Desa yang telah Mengakomodasi Usulan Perempuan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TAHUN 2025
1.	Dukun	26	0
2.	Balongpanggang	25	1
3.	Panceng	14	14
4.	Benjeng	23	0
5.	Duduksampeyan	23	0
6.	Wringinanom	16	1
7.	Ujungpangkah	13	0
8.	Kedamean	15	0
9.	Sidayu	21	12
10.	Manyar	23	3
11.	Cerme	25	2
12.	Bungah	22	2
13.	Menganti	22	0
14.	Kebomas	21	0
15.	Driyorejo	16	0
16.	Gresik	21	1
17.	Sangkapura	17	1
18.	Tambak	13	0
	Jumlah	356	37

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kecamatan yang sudah mengakomodasi usulan perempuan melalui musrenbang tahun

2025 yaitu Kecamatan Balongpanggang sebanyak 1 desa, Kecamatan Panceng sebanyak 14 desa, Kecamatan Wringinanom sebanyak 1 desa, Kecamatan Sidayu sebanyak 12 desa, Kecamatan Manyar sebanyak 3 desa, Kecamatan Cerme sebanyak 2 desa, Kecamatan Bungah sebanyak 2 desa, Kecamatan Gresik sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sangkapura sebanyak 1 desa.

2. Indikator yang kedua yaitu Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG). Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 dari 46 OPD di Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal 30% kegiatannya. Peningkatan yang signifikan ini didukung salah satunya oleh dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik yang sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI.
3. Indikator yang ketiga yaitu Total Fertility Rate (TFR). Nilai Total Fertility Rate (TFR) adalah nilai rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur yang digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator TFR Tahun 2025 yaitu

Aplikasi Siperindu. Nilai TFR tahun 2025 yaitu sebesar 1,92. Nilai TFR sebesar 1,92 kelahiran berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia suburnya.

4. Indikator yang keempat yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR). Nilai Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung capaian indikator CPR yaitu Aplikasi SIGA BKKBN. Nilai CPR tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 65% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa disebabkan karena masih ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB. Berdasarkan target tahun 2025 sebesar 70-76% sehingga didapatkan nilai capaian Indikator CPR sebesar 89,04%. Meskipun nilai CPR mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun nilai capaian Indikator CPR tergolong dalam rentang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.
5. Indikator yang kelima yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Usia Kawin Pertama (UKP) yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan, sehingga nilai UKP dibawah 20 tahun semakin kecil maka semakin baik. Nilai UKP digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih menggunakan data realisasi tahun 2024 dikarenakan perhitungan data UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat.

Persentase UKP dibawah 20 tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27%.

6. Indikator yang keenam yaitu Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif. Dari 100% target cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) tahun 2025, sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Secara rinci data kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6

Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif Tahun 2025 di Kabupaten Gresik

No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	15
2	Februari	30
3	Maret	9
4	April	24
5	Mei	14
6	Juni	38
7	Juli	33
8	Agustus	28
9	September	25
10	Oktober	42
11	Nopember	29
12	Desember	29
	Jumlah	316

7. Indikator yang ketujuh yaitu Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif. Hasil persentase kasus anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif ditampilkan dalam tabel 3.10 berikut.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026 dari target sebesar 100%. Persentase ketercapaian indikator yang didapatkan yaitu sebesar 100%, nilai capaian tersebut tergolong dalam rentang sangat tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai.

Tabel 3.7

**Data Kasus Kekerasan terhadap Anak yang ditangani
Tahun 2025 Kabupaten Gresik**

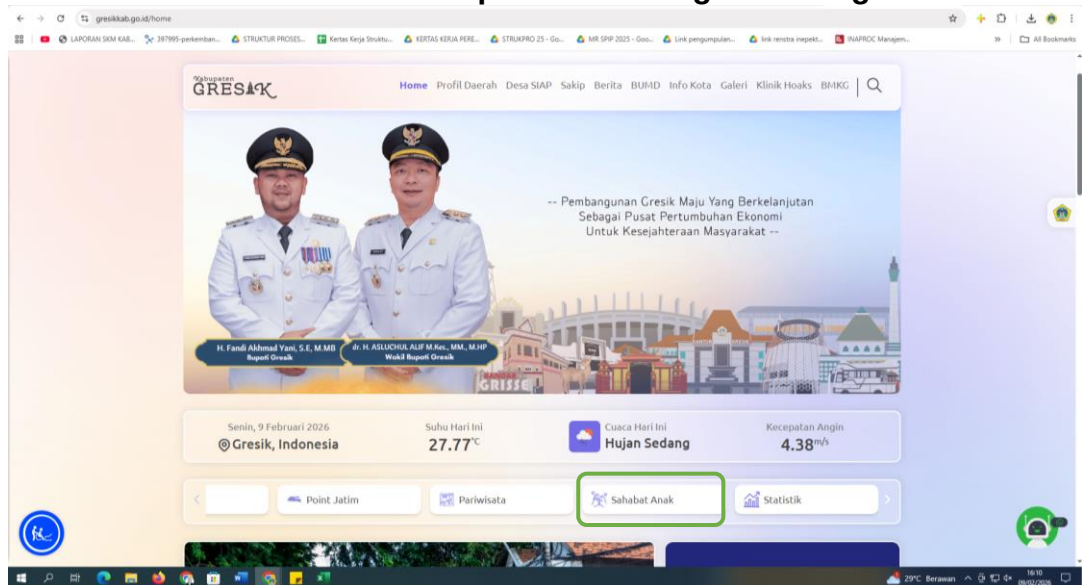
No	Bulan	Tahun 2025
1	Januari	27
2	Februari	40
3	Maret	18
4	April	15
5	Mei	10
6	Juni	36
7	Juli	26
8	Agustus	34
9	September	26
10	Oktober	36
11	Nopember	28
12	Desember	25
	Jumlah	321

8. Indikator yang kedelapan yaitu Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap

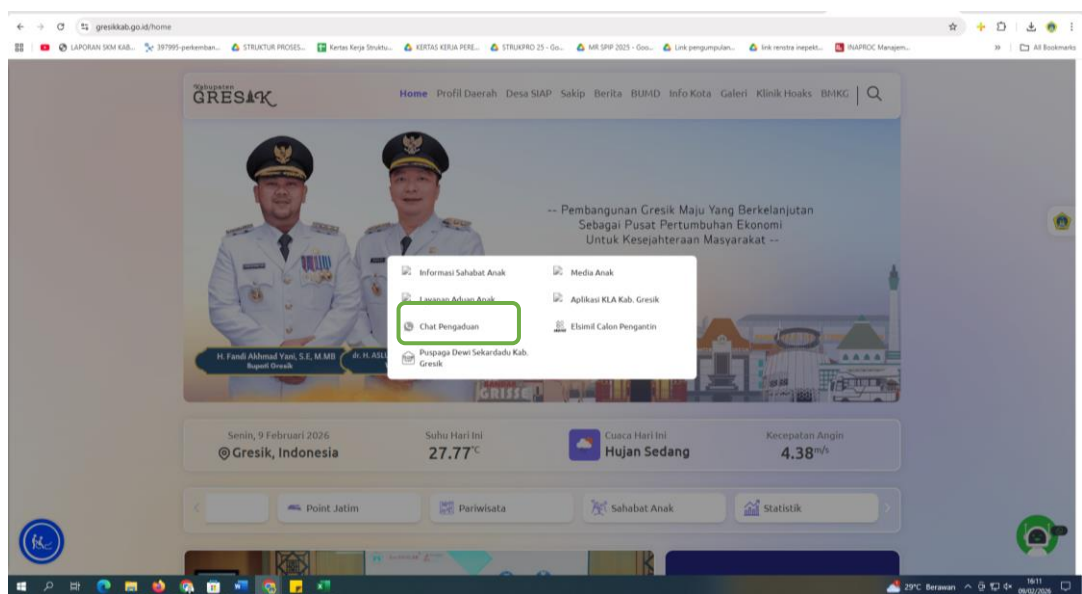
pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE pada tahun 2025 yaitu level 2 atau interaksi, yang berarti bahwa Sistem elektronik/sistem aplikasi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah mampu memberikan fasilitas yang bersifat interaktif (dua arah) dimana pengguna SPBE dapat melakukan interaksi dengan sistem elektronik/sistem aplikasi dan sistem elektronik/sistem aplikasi tersebut dapat memberikan respon. Sistem elektronik/sistem aplikasi memberikan fasilitas unduh/unggah informasi atau dokumen dan fasilitas pencarian informasi kepada pengguna SPBE. Penilaian level 2 didapatkan dari layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik yang telah terpublikasi dan terhubung pada website <https://www.gresikkab.go.id/>, sehingga masyarakat umum bisa mengakses layanan Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik melalui website <https://www.gresikkab.go.id/> yang akan terhubung dengan akun whatsapp Pengaduan UPT PPA Kab. Gresik.

Gambar 3.1
Menu Sahabat Anak pada Website gresikkab.go.id

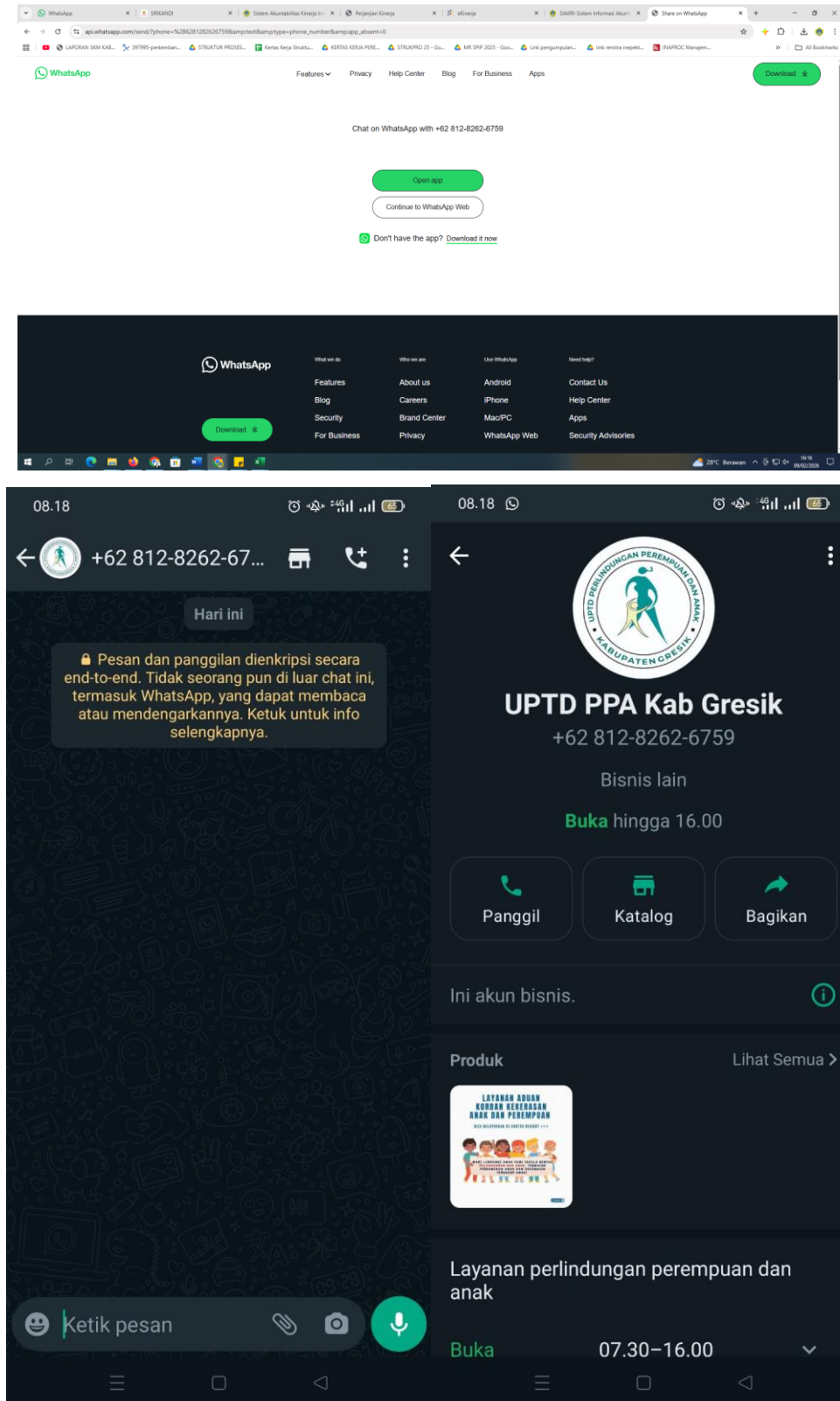


Gambar 3.2
Menu Chat Pengaduan



Gambar 3.3

Tampilan Chat Pengaduan UPTD PPA Kab. Gresik



Selanjutnya evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari sasaran strategis Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tahun 2025 periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS RENSTRA TAHUN 2025-2029

1. Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak;
3. Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
4. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan;
5. Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi;
6. Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan;
7. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi;
8. Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan

Terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja utama untuk mengukur capaian sasaran strategis tahun 2025-2029, realisasi 12 (dua belas) indikator tersebut dapat dilihat pada table 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya
untuk Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92 Kelahiran	1,92 Kelahiran	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Usia Kawin	9,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	Nilai 2025 sama dengan 2024.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
		Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun			Nilai belum diumumkan
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	10 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	MENINGKAT
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	65,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	MENINGKAT
4	Meningkatkan	Rasio realisasi	40 Persentase	72,73 Persentase	MENINGKAT

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	(%)	(%)	
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	30,43 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	MENINGKAT
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,18 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	MENINGKAT
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	9 Persentase (%)	10.6 Persentase (%)	MENURUN
7	Meningkatkan akses, partisipasi,	Persentase kasus Kekerasan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	Nilai sama dengan tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2024)	REALISASI 2025	KETERANGAN
	kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif			
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	MENINGKAT

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Dari 12 (dua belas) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator dengan realisasi yang rata-rata meningkat, 5 (lima) indikator dengan realisasi yang sama dengan tahun 2024, dan 1 (satu) indikator dengan realisasi menurun selama periode renstra tahun 2025-2029. Penjelasan 12 (dua belas) indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Total Fertility Rate

Data Indikator Total Fertility Rate merupakan data yang diambil dari publikasi melalui aplikasi SIPERINDU Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), data yang dipublikasi merupakan realisasi data tahun 2025 dari hasil Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025, dimana data tersebut sama dengan data baseline tahun 2024 yaitu sebesar 1,92 kelahiran yang berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1 sampai 2 anak selama masa usia subur.

2. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun

Data Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun masih menggunakan realisasi data tahun 2024 dikarenakan data laporan usia nikah tahun 2025 masih belum terkumpul sampai dengan laporan ini dibuat. Realisasi indikator Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun pada tahun 2024 yaitu sebesar 9,27% yang berarti bahwa terdapat 9,27% perempuan berusia dibawah sama dengan 20 tahun yang menikah dibandingkan dengan total semua perempuan yang menikah di tahun 2024.

3. Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator yang ketiga yaitu Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, indikator ini merupakan indikator baru di renstra periode 2025-2029, Indikator ini mengukur tren atau tingkat pengajuan dispensasi kawin di pengadilan untuk calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator tersebut di tahun 2025 yaitu sebesar 11,92% dan meningkat ,92% dari baseline tahun 2024 yaitu 10%. Peningkatan tesebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan kasus perkawinan usia anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

4. Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indikator ini menunjukkan seberapa besar cakupan layanan perlindungan yang diberikan kepada anak pekerja migran setelah mereka kembali ke daerah asal. Hingga akhir tahun 2025 belum ada anak pekerja migran yang dipulangkan, namun fasilitas pendampingan sudah tersedia pada UPT perlindungan perempuan dan anak (UPT-PPA). Sehingga realisasi indikator ini dianggap 100%.

5. Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif

Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus anak dalam situasi khusus yang menerima layanan penanganan secara menyeluruh sesuai kebutuhan anak, dengan jumlah seluruh kasus anak dalam situasi khusus yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen.

Anak dalam situasi khusus mengacu pada anak yang menghadapi kondisi kerentanan atau ancaman serius terhadap keselamatan, perkembangan, dan kesejahteraannya, antara lain meliputi:

- Anak korban kekerasan fisik, psikis, atau seksual,
- Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH),
- Anak korban perdagangan orang,
- Anak korban bencana atau konflik,
- Anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait.

Layanan komprehensif mencakup paling sedikit tiga dari lima kategori layanan utama, yaitu:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,
- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi.

Persentase Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) tahun 2025 sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 321 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dengan rincian 302 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 19 kasus lainnya dilanjutkan di tahun 2026. Realisasi di tahun 2025 sebesar 100% sama dengan baseline tahun

2024 yang juga sebesar 100% yang berarti bahwa semua kasus anak korban kekerasan yang dilaporkan telah tertangani.

6. Indeks Pembangunan Keluarga

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran capaian pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi utama, yaitu ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga, yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik. Indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga menjadi tiga kategori: tangguh, berkembang, atau rentan. Pengukuran iBangga bertujuan untuk mengetahui kondisi kualitas keluarga di suatu wilayah, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi keluarga, serta menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan keluarga.

Indikator ini diambil melalui Publikasi di aplikasi SIPERINDU Kemendukbangga, data yang digunakan merupakan data realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 76,9 skor indeks yang termasuk dalam kategori **iBangga** tinggi yang menunjukkan keluarga dalam kondisi tangguh, mampu memenuhi fungsi dan perannya secara optimal.

7. Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan

Rasio Realisasi Usulan Perempuan yang Diakomodasi dalam Perencanaan Pembangunan adalah persentase usulan kegiatan atau program yang disampaikan oleh perempuan melalui mekanisme partisipasi masyarakat (misalnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang, forum konsultasi publik, atau kanal resmi pengusulan) yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dibandingkan dengan total usulan yang diajukan oleh perempuan pada periode tertentu. Usulan perempuan yang dimaksud mencakup aspirasi, ide, atau kebutuhan yang diidentifikasi, dirumuskan, dan diajukan oleh perempuan secara individu atau kolektif, yang relevan dengan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, dan

infrastruktur di wilayahnya. Realisasi usulan perempuan tahun 2025 dapat dilihat pada table 3.9 berikut.

Tabel 3.9
Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang,
Musrenbangdes dan Forum OPD

No	Usulan	Sudah Diakomodasi	Belum Diakomodasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelaksanaan sosialisasi mengenai perlindungan dan hak-hak perempuan dan anak dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat	√	
2	Mendorong partisipasi politik pada perempuan di desa, khususnya perempuan akar rumput, antara lain dengan pendidikan politik bagi perempuan serta peningkatan softskill dan hard-skill yang dibutuhkan	√	
3	Mengembangkan Infrastruktur Ramah Disabilitas di seluruh kantor pemerintahan dan fasilitas umum, termasuk kantor pemerintahan dan fasilitas umum di desa, termasuk juga infrastruktur yang ramah Lansia		√
4	Meningkatkan perlindungan perempuan di tempat kerja, baik dalam perlindungan hukum maupun fasilitas keamanan dan infrastruktur yang responsif gender, termasuk penyediaan ruang laktasi dan tempat penitipan anak untuk bayi dan anak-anak	√	
5	Melanjutkan program/kegiatan Sekolah Perempuan di desa	√	
6	Kemitraan dengan organisasi masyarakat dilakukan untuk memperkuat perlindungan bagi penduduk sementara yang tidak memperoleh layanan berbasis status kependudukan		√
7	Menjadikan Desa Ramah Perempuan dan Anak di semua desa, mengembangkan Program JaketKu untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak bagi semua orang terutama bagi anak usia sekolah dan perempuan akar rumput		√
8	Ada pelatihan keterampilan untuk pelaku UMKM agar nantinya bisa membantu perempuan dalam perekonomian keluarga	√	
9	Diselenggarakan pasar kios di desa, agar para perempuan melalui umkm lokal dapat mandiri secara ekonomi	√	
10	Pelaksanaan layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak di desa, seperti kelas ibu hamil	√	

No	Usulan	Sudah Diakomodasi	Belum Diakomodasi
11	Pelaksanaan pelatihan tentang Digital Marketing bagi perempuan di desa khususnya untuk perempuan pelaku UMKM	√	
Jumlah		8	3

Berdasarkan tabel tersebut rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2025 yaitu sebesar 72,73% meningkat dari baseline tahun 2024 sebesar 40%. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tingkat akomodasi usulan perempuan dalam perencanaan, mengindikasikan perencanaan pembangunan yang responsif gender.

8. Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender.

Persentase Perangkat Daerah yang Minimal 30% Kegiatannya Dilengkapi Dokumen Analisis Responsif Gender adalah perbandingan antara jumlah perangkat daerah yang pada periode pengukuran memiliki sedikitnya 30% dari total kegiatannya dilengkapi dengan Dokumen Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), dengan jumlah seluruh perangkat daerah, dinyatakan dalam persen. Analisis Responsif Gender bertujuan memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program/kegiatan mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara adil. Realisasi pada tahun 2025 sebesar 95,65% yang berarti bahwa sebanyak 44 OPD di Kabupaten Gresik telah melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut pada minimal 30% kegiatannya, realisasi tersebut meningkat dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 30,43%.

9. Unmet need ber-KB

Unmet Need adalah persentase perempuan kawin usia 15–49 tahun yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menunda kelahiran berikutnya, namun tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi di suatu

wilayah. Nilai unmet need tahun 2025 sebesar 7,91%, nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9,18%. Semakin rendah unmet need menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan kontrasepsi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

10. Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Usia Kawin Pertama $\leq$ 20 Tahun pada Keluarga Miskin adalah persentase calon pengantin (catin) dari keluarga miskin yang menikah pertama kali pada usia 20 tahun atau lebih muda dibandingkan dengan seluruh calon pengantin dari keluarga miskin pada periode tertentu. Keluarga miskin dalam indikator ini adalah keluarga yang terdaftar dalam desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, sedangkan data calon pengantin diambil dari aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) BKKBN. Nilai presentase usia kawin pertama dibawah sama dengan 20 tahun dari keluarga miskin tahun 2025 sebesar 10,6%. Nilai ini menurun dibandingkan dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 9%. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingginya prevalensi perkawinan usia dini pada keluarga miskin, yang berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan dan kerentanan sosial.

11. Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif adalah perbandingan antara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dengan pemberian layanan secara menyeluruh sesuai kebutuhan korban, dengan jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada periode tertentu, dinyatakan dalam persen. Layanan komprehensif dalam indikator ini mencakup, tapi tidak terbatas pada:

- Layanan medis/kesehatan,
- Layanan psikologis/psikososial,
- Pendampingan hukum dan bantuan hukum,
- Penyediaan shelter/rumah aman,

- Layanan reintegrasi sosial dan/atau ekonomi

Data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif sebanyak 100% kasus sudah tertangani yaitu sebanyak 316 kasus telah mendapatkan penanganan sesuai Standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 295 kasus telah terselesaikan di tahun 2025 sedangkan 21 kasus lainnya prosesnya masih berlanjut di tahun 2026. Realisasi data persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif tahun 2025 sama dengan baseline tahun 2024 yaitu sebesar 100%.

12. Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan

Indikator ini merupakan indikator baru di Renstra periode 2025-2029 yang tidak ada di periode Renstra Tahun 2021-2025. Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan adalah persentase kepala rumah tangga perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan menerima minimal satu bentuk intervensi atau fasilitas dari program pemberdayaan ekonomi, sosial, atau keterampilan pada periode tertentu dibandingkan dengan total kepala rumah tangga perempuan miskin. Kepala rumah tangga perempuan miskin dalam indikator ini merujuk pada perempuan yang berperan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga dan terdaftar dalam Desil 1 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial – Ekstrem Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial. Program pemberdayaan meliputi, namun tidak terbatas pada bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, akses pemasaran, fasilitasi usaha, pendidikan literasi keuangan, atau program peningkatan kapasitas lainnya yang bertujuan mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Rasio Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin yang Mendapatkan Akses Program Pemberdayaan tahun 2025 sebanyak 8,64% dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan baseline tahun 2024 sebesar 6,86%. Nilai yang tinggi menunjukkan semakin banyak kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapat akses program pemberdayaan, mengindikasikan jangkauan program yang baik.

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2026 Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10%	10,39%	+
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30%	95,65%	+
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	1,9-2%	1,92 kelahiran	=
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76%	65%	-
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	12,15%	9,27*%	+
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat	100%	100%	=

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2026	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
	untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Layanan Komprehensif			
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	100%	=
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 3	Level 2	-

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa terdapat 3 indikator dengan kategori meningkat yaitu indikator Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan, Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG), dan Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun. Terdapat 3 indikator dengan kategori tetap yaitu Total Fertility Rate (TFR), Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori menurun ada 3 yaitu Contraceptive Prevalency Rate (CPR) dan Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE.

Selanjutnya merupakan perbandingan realisasi kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Gresik tahun 2025 dengan Target Akhir Tahun 2029 pada periode Renstra Tahun 2025-2029. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir
Rencana Strategis untuk Periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	1,92-2 Kelahiran	1,92 Kelahiran	+
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	8,27 Persentase (%)	9,27* Persentase (%)	-
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	5,6 Persentase (%)	11,92 Persentase (%)	+
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	71,72 Skor Indeks (0-100)	76,9 Skor Indeks (0-100)	+
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	40 Persentase (%)	72,73 Persentase (%)	+
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	100 Persentase (%)	95.65 Persentase (%)	-
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	9,12 Persentase (%)	7,91 Persentase (%)	+
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20	8 Persentase (%)	10.6 Persentase (%)	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET AKHIR 2029	REALISASI 2025	TINGKAT KEMAJUAN
	bagi kelompok rentan	Tahun dari keluarga miskin			
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100 Persentase (%)	100 Persentase (%)	=
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	6,86 Persentase (%)	8.64 Persentase (%)	+

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa terdapat 6 indikator dengan kategori meningkat yaitu Total Fertility Rate, Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin, Indeks Pembangunan Keluarga, Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, Unmet need ber-KB dan Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan. Terdapat 3 indikator dengan kategori tetap yaitu Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan, Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif, Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan

yang mendapat layanan komprehensif, sedangkan indikator dengan kategori menurun ada 3 yaitu Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun, Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender, Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Tidak menggunakan indikator yang sama	10,39%	Nihil
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Tidak menggunakan indikator yang sama	95,65%	Nihil
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Nasional : 2,12 Prov. Jawa Timur : 1,96 Kota Surabaya : 1,65 Kota Mojokerto : 1,84 Kab. Lamongan : 1,82 Kab. Sidoarjo : 1,81	1,92 kelahiran	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi jawa timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian kab/kota terdekat
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Tidak menggunakan indikator yang sama	65%	Nihil
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Tidak menggunakan indikator yang sama	9,27*%	Nihil
3.	Mewujudkan	Persentase Kasus	Tidak menggunakan indikator yang sama	100%	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif			
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100%	Nihil
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Tidak menggunakan indikator yang sama	Level 2	Nihil

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional / Provinsi Jawa Timur / Kab. Kota Lain untuk periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Nasional : 2,12 Prov. Jawa Timur : 1,96 Kota Surabaya : 1,65 Kota Mojokerto : 1,84 Kab. Lamongan : 1,82 Kab. Sidoarjo : 1,81	1,92 Kelahiran	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan provinsi jawa timur, namun lebih rendah dibandingkan capaian kab/ kota terdekat
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Tidak menggunakan indikator yang sama	9,27* Persentase (%)	Nihil
2	Meningkatkan akses	Penurunan Kasus	Tidak menggunakan indikator yang sama	11,92 Persentase (%)	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	terhadap layanan perlindungan khusus anak	Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin			
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Nasional : 67,3 Prov. Jawa Timur : 67,3 Kota Surabaya : 71,6 Kota Mojokerto : 83,2 Kab. Lamongan: 70 Kab. Sidoarjo : 76,3	76,9 Skor Indeks (0-100)	Lebih tinggi dibandingkan capaian nasional,prov . Jawa timur, kota Surabaya, kab. Lamongan, kab. sidoarjo tapi lebih rendah dari capaian kota Mojokerto
4	Meningkatkan	Rasio	Tidak menggunakan indikator yang sama	72,73 Persentase	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan		(%)	
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Tidak menggunakan indikator yang sama	95.65 Persentase (%)	Nihil
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Nasional : 13,4% Prov. Jawa Timur : 8,8% Kota Surabaya : 13,2% Kota Mojokerto : 6,5% Kab. Lamongan : 12,1% Kab. Sidoarjo : 9,9%	7,91 Persentase (%)	Lebih tinggi dari capaian nasional, prov. Jawa timur, kota Surabaya, kab. Lamongan, Kab. Sidoarjo, tapi lebih rendah dari capaian Kota Mojokerto
6	Meningkatkan akses terhadap	Persentase Usia Kawin Pertama	Tidak menggunakan indikator yang sama	10.6 Persentase (%)	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN	PERANG-KAT DAERAH	LEBIH RENDAH / LEBIH TINGGI
	layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin			
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Tidak menggunakan indikator yang sama	100 Persentase (%)	Nihil
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Tidak menggunakan indikator yang sama	8.64 Persentase (%)	Nihil

Keterangan : (*) Data Tahun 2024

Tabel 3.14

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra

Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Faktor penunjang : Dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI	Nihil
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Faktor penunjang : Ada upaya afirmatif untuk pendampingan yang aktif dari tim pokja PUG dan PPRG untuk mendampingi penyusunan dokumen di semua OPD	Nihil
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Faktor penghambat : masih ada nilai yang dianut masyarakat yang menghambat kepesertaan KB	Akan ditingkatkan edukasi dan promosi penggunaan alat kontrasepsi dalam perencanaan keluarga pada pasangan usia subur
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta diperlengkapi	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
	Perlindungan Khusus		dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Nihil
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Faktor penunjang : Ada fasilitasi dan dukungan dari Diskominfo	Nihil

Tabel 3.15

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan untuk periode Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	Faktor penunjang : ada kegiatan pendampingan keluarga dan aplikasi elsimil	Nihil
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Faktor penunjang : Ada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang berjalan dengan baik	Nihil
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
		Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	Faktor penunjang : Adanya penyelenggaraan program tribina dan kampung KB di setiap desa	Nihil
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	Faktor penunjang : Dokumen perencanaan pembangunan di kabupaten gresik sudah mulai menunjukkan keberpihakan pada GEDSI	Nihil
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Faktor penunjang : Ada upaya afirmatif untuk pendampingan yang aktif dari tim pokja pug dan pprg untuk mendampingi penyusunan dokumen di semua OPD	Nihil
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Faktor penunjang : ada anggaran DAK yang membiayai seluruh kegiatan KB	Nihil
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	Faktor penghambat: belum ada kegiatan yang secara khusus menyasar pada keluarga berpenghasilan rendah yang lebih rentan untuk melakukan perkawinan dibawah usia ideal atau bahkan usia anak	akan diadakan kegiatan yang terpadu dan komprehensif serta bersasaran
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Faktor penunjang : Terdapat UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah menyediakan layanan secara komprehensif, dibiayai secara berkelanjutan serta dilengkapi dengan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai	Nihil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN	SOLUSI
	multidimensi			
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Faktor penunjang : Ada evaluasi dan pendampingan keberlanjutan program	Nihil

C. Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2025.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2025, anggaran Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebesar Rp. 22.453.100.650,75,- yang direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70,- atau 90,49%. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16

**Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode
Renstra Tahun 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodi usulan perempuan	0,84%	Rp. 189.450.499	Rp. 166.315.500	87,79%
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	0,80%	Rp. 179.994.420	Rp. 158.751.945	88,20%
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	2,53%	Rp. 567.600.000	Rp. 514.638.052	90,67%
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	18,12%	Rp. 4.067.581.000	Rp. 3.135.440.824	77,08%
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	41,95%	Rp. 9.418.339.000	Rp. 9.255.758.538	98,27%
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	1,88%	Rp. 421.368.252	Rp. 395.640.524	93,89%
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	2,81%	Rp. 631.749.210	Rp. 512.215.429	81,08%
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	31,07%	Rp. 6.977.018.270	Rp. 6.178.295.164	88,55%
				Rp. 22.453.100.650,75	Rp. 20.317.055.975,70	90,49%

Dari 8 (delapan) indikator Kinerja Utama, terdapat 3 (tiga) IKU dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5 (lima) IKU dengan realisasi anggaran kategori Tinggi.

Tabel 3.17

**Alokasi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan untuk periode Renstra
Tahun 2025-2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	40,13%	Rp. 9.010.808.770,48	Rp. 7.746.015.575,70	85,96%
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	11,39%	Rp. 2.556.510.950,00	Rp. 2.420.119.024,50	94,66%
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	11,12%	Rp. 2.497.859.086,67	Rp. 2.449.284.980,83	98,06%
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	0,64%	Rp. 143.274.336,67	Rp. 135.345.346,33	94,47%
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	0,64%	Rp. 143.274.336,67	Rp. 135.345.346,33	94,47%
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	11,29%	Rp. 2.534.579.169,68	Rp. 2.472.691.579,50	97,56%
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	11,59%	Rp. 2.601.390.500,00	Rp. 2.082.358.464,00	80,05%
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	10,49%	Rp. 2.354.584.750,00	Rp. 2.313.939.634,50	98,27%
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan	1,88%	Rp. 421.368.252,09	Rp. 395.640.524,00	93,89%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALOKASI	PAGU ANGGARAN PAPBD	REALISASI PAPBD	CAPAIAN
	perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	komprehensif				
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	0,28%	Rp. 63.150.166,17	Rp. 55.438.500,00	87,79%
				Rp22.453.100.650,75	Rp. 20.317.055.975,70	90,49%

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama, terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Sangat Tinggi dan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan realisasi anggaran kategori Tinggi.

Pada tahun 2025 capaian kinerja terhadap Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik menunjukkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 90,49% yang termasuk dalam kategori Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20% menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Berikut merupakan tabel efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2021-2026.

Tabel 3.18
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode Renstra
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN PAPBD	EFISIENSI
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodo-dasi usulan perempuan	103,90%	87,79%	15,51
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	110,00%	88,20%	19,82
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	101,54%	90,67%	10,71
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	89,04%	77,08%	13,43
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	110,00%	98,27%	10,66
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	93,89%	6,11
	Berbasis Gender dan Anak Yang	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	81,08%	18,92
	Memerlukan Perlindungan Khusus	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	100%	88,55%	11,45
			101,81%	90,49%	11,60

Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar 11,60% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2021-2026.

Selanjutnya yaitu tabel efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2025-2029.

Tabel 3.19
Efektifitas Penggunaan Sumber Daya untuk periode
Renstra Tahun 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN PAPBD	EFISIENSI
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	102,04%	85,96%	15,75
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	100%	94,66%	5,34
2	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus anak	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin	110%	98,06%	10,86
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	100%	94,47%	5,53
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100%	94,47%	5,53
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks Pembangunan Keluarga	115,26%	97,56%	15,36
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	110%	87,79%	20,19
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	110%	87,79%	20,19
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	110%	80,05%	27,23
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	82,22%	98,27%	-19,53
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	93,89%	6,11
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	110%	87,79%	20,19
			102,73%	90,49%	12,18

Berdasarkan rumus efisiensi didapatkan nilai efisiensi sebesar 12,18% sehingga dapat disimpulkan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah efisien dalam penggunaan sumber daya pada periode renstra tahun 2025-2029.

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.20

**Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah Periode Renstra 2021-2026**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
1.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Program : Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	Total Fertility Rate (TFR)	Program : Program Pengendalian Penduduk Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
			Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	Program : Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3.	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program : Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program 1: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Program 2: Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan yang berkontribusi secara langsung dalam pencapaian kinerja dan efektifitas penggunaan sumber daya untuk periode renstra tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.21

Analisis Program/Kegiatan Penunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Periode Renstra 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
1	Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak	Total Fertility Rate	Program 1: Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Program 2: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2: Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan : 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Meningkatkan akses terhadap layanan	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
	perlindungan khusus anak	pengajuan dispensasi kawin	Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2: Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan	Program : Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	Program : Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan : 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Mewujudkan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	Indeks Pembangunan Keluarga	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
	Alternatif		1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Program 2 : Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan : 1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Persentase perangkat daerah yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
5	Menurunkan ketimpangan kesehatan reproduksi	Unmet need ber-KB	Program : Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Program : Program Pengendalian Penduduk Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG
			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
6	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	Program 1: Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
7	Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat perempuan dalam pembangunan dan keberdayaan multidimensi	Persentase kasus Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Program : Program Perlindungan Perempuan Kegiatan : 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten / Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
8	Meningkatkan akses kepala rumah tangga perempuan miskin terhadap program pemberdayaan	Rasio kepala rumah tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan	Program : Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan : 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 3 (tiga) sasaran strategis periode Renstra tahun 2021-2026 dan capaian kinerja 8 (delapan) sasaran strategis periode Renstra tahun 2025-2029 Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 8 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. 7 indikator mencapai kategori sangat tinggi sedangkan 1 indikator mencapai kategori tinggi pada periode Renstra Tahun 2021-2026 begitupun pada periode Renstra Tahun 2025-2029, dari 12 (dua belas) indikator terdapat 11 (sebelas) indikator dengan kategori Sangat Tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kategori Tinggi.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar Rp. 22.453.100.650,75,- yang direalisasikan sebesar Rp. 20.317.055.975,70,- atau 90,49%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Berikut merupakan matriks Tindak Lanjut dari indikator kinerja utama yang tidak mencapai target ditahun 2025

Tabel 4.1
Tindak Lanjut Indikator Kinerja Utama yang tidak tercapai Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (<100%)	PERMASALAHAN UTAMA	ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG	ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF	RENCANA TINDAK LANJUT	TIME LINE 2026			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Meningkatkan akses terhadap layanan perlindungan khusus bagi kelompok rentan	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin	82,22%	Pencegahan perkawinan pertama dibawah sama dengan 20 tahun selama ini dilakukan secara generik dengan sasaran keluarga yang memiliki anak usia remaja tanpa membedakan status sosial ekonomi, tanpa intervensi khusus pada keluarga yang berpenghasilan rendah / miskin.	Kegiatan yang mencegah perkawinan pertama dibawah sama dengan 20 tahun meliputi : ● Penyediaan honorarium bagi kader IMP, Pengelola dan Pelaksana Bina Keluarga Remaja - belum memiliki intervensi khusus keluarga miskin; ● Penyelenggaraan Screening Psikologis bagi Pemohon Dispensasi Kawin kurang efektif untuk mencegah karena pernikahan sudah dalam	Penyelenggaraan Puspaga kurang efektif untuk mencegah perkawinan bawah sama dengan dua puluh tahun karena : - Puspaga diselenggarakan di tingkat kabupaten saja; - Puspaga merupakan layanan yang memberikan pendampingan berdasarkan	Mengaktifkan layanan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera yang selama ini lebih ditekankan untuk meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana, menjadi pusat layanan sekaligus promosi dan edukasi masyarakat terkait pengasuhan,		√		√

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (<100%)	PERMASALAHAN UTAMA	ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG MENUNJANG	ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN YANG KURANG EFEKTIF	RENCANA TINDAK LANJUT	TIME LINE 2026			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
					perencanaan ● Sekolah Perempuan dan Bunda Puspita lebih fokus pada pemberdayaan perempuan dan tidak memiliki program / intervensi khusus untuk mencegah terjadinya perkawinan anak secara umum. ● Pusat Pembelajaran keluarga (Puspaga) diselenggarakan hanya pada tingkat kabupaten.	pengaduan	perencanaan keluarga, termasuk perkawinan anak, terutama yang tergolong keluarga berpenghasilan rendah,				



LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

**DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Jabatan : KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : FANDI AKHMAD YANI

Jabatan : Bupati Gresik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. TITIK ERNAWATI, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19760903 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	10 %
		2	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	30 %
2	Peningkatan Peran dan Fungsi Keluarga dalam Pembangunan Daerah, Inisiasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Gresik dan Pembinaan Karakter	1	Total Fertility Rate (TFR)	1.9-2
		2	Contraceptive Prevalency Rate (CPR)	70-76 %
		3	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	11.48 %
3	Mewujudkan Layanan Komprehensif untuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 %
		2	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	100 %
		3	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	Level 2

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp. 252,298,075.00	APBD
2	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp. 436,611,860.09	APBD
3	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp. 195,320,000.00	APBD
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp. 36,630,925.00	APBD
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp. 454,071,000.00	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 7,290,683,224.95	APBD
7	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp. 567,600,000.00	APBD
8	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp. 4,351,931,000.00	APBD
9	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp. 9,064,389,000.00	APBD
Jumlah			Rp. 22,649,535,085.04	

PIHAK KEDUA
BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI

Gresik, 6 Januari 2025

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

dr. TITIK ERNAWATI, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19760903 200701 2 010

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Gresik Renja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Periode Pelaksanaan 2025																										
Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik																										
No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggungjawab		Ket.
								I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	9		10		11		12		13		14=10+11+12+13		15=14/3x100		16= 8x14		17= 16/2x100		18	19	
	2.14.208.0.00.05.0000		DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				22.453.108.651		1.857.617.712		4.456.140.335		5.917.689.704		8.017.038.570	712	20.318.705.991	116	90,49	116	44.333.965.102		245,48			
1	2	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Dengan Meningkatkan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22.453.108.651		1.857.617.712		4.456.140.335		5.917.689.704		8.017.038.570	712	20.318.705.991	116	90,49	116	44.333.965.102	139	305,48			
1	2.08.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.422.562.380		81.063.395,00		252.046.162,00		268.811.770,00		631.002.051,00	495,00	1.232.923.398,00	123	86,67	23,90	4.294.167.096	122,83	23,90			
	3.06.01.2.08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	Jenis	1	77.782.436	-	-	-	-	0	-	1	70.219.670,00	1,00	70.219.670,00							Setretaris		
	2.08.01.2.08.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	Jenis		77.782.436						-													
	2.08.02.	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar secara inklusif dan berkeadilan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Uruian Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	paket	30,00	169.450.499	0,00	16.780.500	0,00	35.779.000	0	36.841.000	0	76.915.000	112	166.315.500	373	87,79	190	850.094.510	342,86	70,44	Kepala Bidang PP dan PUG		
a	2.08.02.2.01.		Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah melakukan ARD pada minimal 30% Anggarannya	Perangkat Daerah	10,00	34.130.710	0,00	994.500	-	-	52	13.438.000	55,00	14.609.000	107	29.041.500	1070	85,09	190	209.469.980,00	345,45	71,54	Kepala Bidang PP dan PUG		
1	2.08.02.2.01.03.	Terkutusnya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan PUG	Perangkat Daerah	75	34.130.710	0	994.500	0	0	68	13.438.000	75	14.609.000	143	29.041.500	191	85,09	190	209.469.980,00	345,45	68,78	Kepala Bidang PP dan PUG	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Juli	
b	2.08.02.2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Telah Memfasilitasi Kegiatan Kelompok Perempuan dalam APBDdes	Desa	65	0	0	-	0	-	-	0	-	-	-	0	0,00	17	220.071.500,00	-	35,42	Kepala Bidang PP dan PUG			
c			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi		3,00	155.319.789	2	15.786.000	0	35.779.000	3	23.403.000	0	62.306.000	5	137.274.000							Kepala Bidang PP dan PUG		
2	2.08.02.2.02.01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	0	210	0	0	0	0	-	-	210	0	5260	210		-	5260	-		Kepala Bidang PP dan PUG		
3	2.08.02.2.02.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	organisasi	17	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	0,00	17	220.071.500,00	100	171,17	Kepala Bidang PP dan PUG			
c	2.08.02.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	orang	3	155.319.788,50	3	15.786.000	3	35.779.000,00	3	23.403.000	0	62.306.000	9	137.274.000	300	88,38	10	420.553.030,00	100,00	143,62	Kepala Bidang PP dan PUG	Kegiatan masih dilaksanakan sebagian	
	2.08.02.2.03.02		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	orang	300	155.319.789	210	15.786.000	20	35.779.000	40	23.403.000	30	62.306.000	300	137.274.000	100	88,38	300	420.553.030,00	44,44	152.098,75	Kepala Bidang PP dan PUG	Jumlah SDM yang mendapat peningkatan kapasitas masih sama dengan Triwulan I	
2.08.03		Peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas, baik fisik, anak yatim, dan anak-anak terlarang yang memperoleh manfaat penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang efektif, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif, pelatihan vokasi dan peningkatan kesempatan kerja	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diatasakan	Persen	96	421.368.252,09	38	30.897.700	87	62.162.947	83,00	132.575.500,00	-	169.984.377	208	395.640.524,00	217	93,69	301,69	670.768.994,00	86,33	78,51	Kepala Bidang PUHA		
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Certification Elektronik (BBCE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)																										

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	OPD		30	89.460.000,00	-	-	8,00	2.200.000,00	10	40.020.000,00	13,00	41.784.000	31,00	84.004.000,00	10	10	131.523.300,00	83,00	Kepala Bidang PUIA		
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	89.460.000	-	1,00	2.200.000	1	40.020.000,00	1,00	41.784.000	1,00	84.004.000	10	83,00	131.523.300,00	83,00	Kepala Bidang PUIA			
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang berhasil diselesaikan	kasus		115	237.535.392,00	35	12.306.100,00	76	42.488.111,00	70	58.638.900,00	100	113.913.777	201,00	228.356.888,00	244	96,14	396.022.558,00	345	85,49	Kepala UPT	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	orang		100	110.296.392	51	12.306.100	86	42.498.111	0	-	80	49.998.146	217,00	104.402.357	217	94,66	166.796.727,00	217,00	37,18	Kepala UPT	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tidak Larut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		100	127.239.000	3	-	2	-	17	59.638.900,00	10	64.315.631	17	123.954.531	17	97,42	229.229.831,00	42,00	912,65	Kepala UPT	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Dserah Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga / kelompok masyarakat yang difasilitasi	lembaga		3	94.372.860,09	3	18.591.600	3	17.484.836	3	32.916.600,00	0	14.286.600	0	83.279.636	300	88,25	143.236.936,00	100,00	39,13	Kepala UPT	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan.	Perangkat Daerah		10	19.380.000	0	10	6.800.000		12.128.000,00	0	-	10	18.928.000	100	97,67	45.464.300,00	10,00	-	Kepala UPT	DAK tidak ada	
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	orang		100	74.992.860	21	18.591.600	21	10.684.836	19	20.788.600,00	0	14.286.600	69	64.351.636	69	85,81	97.772.636,00	221	66,78	Kepala UPT	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya	Persen		1	179.994.419,68	0,00	-	0,00	32.774.945,00	0	31.670.500,00	0	94.306.500	0,00	158.751.945,00	0	88,20	1.514.989.661,00	0,00	10,35	Kepala Bidang PP dan PUG	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga sasaran yang pendapatannya diatas garis kemiskinan	orang		32	179.994.420	0	-	8	32.774.945	8	31670500	0	94.306.500	16	158.751.945	50	88,20	1.514.989.661,00	100,00	10,35	Kepala Bidang PP dan PUG	Kegiatan masih dilaksanakan sebagian
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan		0	179.994.420	0	-	0	32.774.945	0	31.670.500	1	94.306.500	1	158.751.945	0	88,20	1.514.989.661,00	143,75	10,35	Kepala Bidang PP dan PUG	Kegiatan pembelajaran dilaksanakan bulan juli dan agustus
2.08.2.14.2.08.5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Keterlaksanaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator Permenn PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak	Persen		70	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-	0,00	-		
2.08.2.14.2.08.5.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersedia	variabel		2	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0	0	0,00	2	-	100,00		
2.08.2.14.2.08.5.2.01.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia	dokumen		1	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0	0	0,00		0			
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	point		140	201.926.200,00	19,00	14.300.000	26,00	2.310.000	53,00	5.918.000	0,00	83.651.300	98,00	106.179.300	79	52,58	473.423.395,00	50,00	74,33	Kepala Bidang PUIA	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator KLA yang telah diidentifikasi oleh OPD/Perusahaan / Lembaga Masyarakat	Indikator		12	119.044.700,00	7	900.000	10	750.000	7	1.500.000	7,00	31.506.399	24,00	34.656.399	200	29,11	401.900.395,00	-	219,60	Kepala Bidang PUIA	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik																							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	organisasi	82	119.044.700	7		900.000	10	750.000	40	1.500.000	59,00	31.506.389	57,00	34.696.390	70	29,11	139	163.488.295,00	169,51	148,89	Kepala Bidang PUHA	
2.08.2.14.2.08.6.2.01.2		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	4	-	4		-	0	-	0	-	-	-	4	0	100			-	-	-	Kepala Bidang PUHA	
2.08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Ramah Anak Yang Sudah Di selenggarakan	jenis	7	82.881.500,00	5		13.400.000	6	1.560.000	6	4.418.000	7,00	52.145.000	24,00	71.523.000	343	86,30		309.935.100,00	68,29		Kepala Bidang PUHA	
2.08.06.2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	-	0		-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0,0	-	Kepala Bidang PUHA	
2.08.06.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	82.881.500	3		13.400.000,00	4	1.560.000,00	6	4.418.000	7	52.145.000	20,00	71.523.000	400	86,30	27	309.935.100,00	385,71	232,86	Kepala Bidang PUHA	
2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Berhasil Diselesaikan	Persen	100	429.923.010,00	77		19.085.195,00	65	118.999.290,00	70	61.806.770,00	9,98	206.144.784,00	77	406.036.639,00	77	94,47	161,00	774.870.536,00	161,00	142,52	Kepala UPT	
2.08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang telah berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam melakukan pencegahan kekerasan	lembaga	25	80.050.000,00	0		-	0	-	10	21.517.000,00	15,00	46264000	25,00	67.781.000	100	84,67		115.828.900,00	-	640,94	Kepala Bidang PUHA	
2.08.07.2.01.04		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang	17	80.050.000	0	0	0	0	0	25	21.517.000,00	15	46.264.000	40,00	67.781.000	235	84,67		115.828.900,00			Kepala Bidang PUHA	DAK tidak ada
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang											275.876.539		275.876.539								
2.08.07.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	3	-	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0			-	-	-	Kepala UPT	
2.08.07.2.01.01	Tersedianya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	orang	6	-	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kepala UPT	DAK tidak ada target Renstra
2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Anak Dalam Situasi Khusus Yang Berhasil Diselesaikan	Kasus	80	280.753.010,00	69		19.085.195,00	55	76.576.790,00	70	38.048.770,00	70	140.164.784,00	264,00	275.876.539,00	339	96,26		555.063.536,00	-	105,66	Kepala UPT	
2.08.07.2.02.0005		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100	120.702.010	77		19.085.195	65	30.116.538	70	7.624.500,00	80	60.143.829	292,00	116.970.062	292	96,91	392	268.361.996,00	392,00	73,34	Kepala UPT	
2.08.07.2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	kasus	20	0	4	0	5	0			-		0	4	0	20			-	-	-	Kepala UPT	
2.08.07.2.02.03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen	5	0	0	0	0	0			-		0	0	0	0			-	-	-	Kepala UPT	
2.08.07.2.02.06		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	anak	100	160.051.000	77		19.085.195	65	30.116.538	70	7.624.500,00	80	60.143.829	292,00	116.970.062	292	96,91	392	268.361.996,00	392,00	73,34	Kepala UPT	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.08.07.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang mendapatkan peningkatan kapasitas	lembaga	2	69.020.000,00	0	35	40.422.500,00	0	2.240.000	-	19.716.000,00	35	62.378.500	1730	90,38		103.978.500,00	-	-	-	Kepala UPT	DAK tidak ada
2.08.07.2.03.02	Tetapkannya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kapasitas bagi Sumber Daya Lembaga	kali			0		-	-	-	0	0	0	0	0,00		-	-	-	Kepala UPT			
2.08.07.2.03.0006		Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang telah dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	orang	53	69.020.000	0	35	40.422.500,00		2.240.000	18	19.716.000	35	62.378.500	66	90,38		103.978.500,00	-	-	-	Kepala UPT	
																			-	-	-	Kepala UPT		
																			-	-	-	Kepala UPT		
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																						
2.14.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program OPD yang sudah terfasilitasi	Person	100	6.899.235.834,49	100,00	1.586.268.435	100,00	1.535.091.066,85	100	1.422.088.598,00	-	1.566.375.365	100	6.109.725.566,70	100	88,96	89,00	12.272.485.919,76	94,50	28,40	Kesejahteraan	
2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	dokumen	1	10.730.000,00	1,00	1.680.000	1,00	3.312.000	1	900.000	-	-	1,00	5.892.000	100	54,91	2,00	30.815.466,00	40,00	92,61	Kesejahteraan	
2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6	10.730.000	6	1.680.000	6	3.312.000	6	900.000	-	-	6,00	5.892.000	100	54,91	7,00	14.124.200,00	320,00	53,06	Kesejahteraan	
2.14.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	9	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0,00	12,00	16.691.266,00	100,00	1.680,46	Kesejahteraan	
2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan gaji dan Tambahan Penghasilan PNS yang terbayar	bulan	1.942188752	4.744.113.468,57	1.942188752	1.134.580.127	1.9421888	1.148.384.414	1.9421888	867.996.283	12,00	945.197.578	1,84	4.096.158.402	100	86,34	4,94	8.013.422.868,76	41,18	174,06	Kesejahteraan	
2.14.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	27	4.744.113.469	27	1.134.580.127	27	1.148.384.414	23	867.996.283	23	945.197.578	27	4.096.158.402	100	86,34	50,00	8.013.422.868,76	192,31	174,06	Kesejahteraan	
2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah peserta pembinaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	orang	1	-	-	0	-	0	-	-	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	-	-	-	Kesejahteraan		
2.14.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-	Kesejahteraan		
2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instansi listrik dan peralatan serta perlengkapan kantor / rumah tangga yang terpenuhi	jenis	15	197.287.419,92	15,000	1.343.018	15,000	64.266.280	0	82.390.967	15	38.570.229	15,00	186.570.494	100	94,57	45,00	406.988.158,00	300,00	181,35	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	11	999.200	11	0	11	0	15	-	1	593.000	15,00	593.000	136	99,35	30,00	3.416.500,00	100,00	85,42	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	45.973.210	10	0	10	14.400.000		-	4	27.796.149	10,00	42.190.149	100	0,00	10,00	42.190.149,00	66,67	213,37	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	8	127.124.100	8	834.009	8	42.615.100	10	70.619.634	20	8.491.728	10,00	122.560.471	125	96,41	20,00	259.008.771,00	200,00	259,05	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	6	6.193.850	6	509.009	6	-	4	2.493.333	4	1.695.352	8,00	4.697.694	133	75,94	16,00	8.808.694,00	200,00	95,41	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	dokumen	1422	0	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0,00	0,00	-	-	-	Kesejahteraan		
2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	245	16.997.060	0	-	100	7.251.180	145	9.278.000	0	-	245,00	16.529.180	100	97,25	845,00	93.564.044,00	140,83	112,76	Kesejahteraan	
2.14.01.2.06.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Operasional yang	orang	93	1.825.906.546	30,00	443.665.290	30,00	314.538.397	33	431.698.178	49	529.030.128	93,00	1.718.931.993	100	94,14	93,00	3.539.271.157,00	202,17	281,17	Kesejahteraan	
2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	9	181.548.546	9	19.455.720	9	38.081.565	9	35.872.198	9	53.878.088	9	147.287.571	100	81,13	12,00	255.282.875,00	400,00	233,78	Kesejahteraan	
2.14.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	7	1.644.358.000	7	424.209.570	7	276.456.832	6	395.825.980	49	475.152.040	7	1.571.944.422	100	95,98	50,00	3.283.988.282,00	116,28	285,68	Kesejahteraan	
2.14.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitas pemeliharaan yang tersedia	jenis	4	121.198.400,00	4,00	5.000.000	4,00	4.500.000	4	39.095.170	4	53.577.450	4,00	102.172.620	100	84,30	8,00	281.988.270,00	200,00	683,74	Kesejahteraan	
2.14.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	unit	12	28.998.400	12	2.500.000	1	4.500.000	2	7.161.670	1	12.700.000	12	26.861.670	100	92,63	13,00	80.682.170,00	325,00	272,35	Kesejahteraan	

2.14.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	unit	8	63.000.000	8	2.900.000	0	-	8	25.898.000	8	34.530.315	8	62.928.315	100	99,89	38,00	144.478.465,00	1.266,67	579,98	Kesejahteraan	
2.14.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	gedung	3	0	0	0	0	0	5	6.035.500	5	6.347.135	5	12.382.635	167	0,00	5,00	12.382.635,00	100,00	47,29	Kesejahteraan	
2.14.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	sarana	9	29.200.000	0	-	0	-	5	6.035.500	10	6.347.135	5	12.382.635	56	42,41	10,00	56.827.635,00	200,00	217,03	Kesejahteraan	
									0															
									0															
2.14.02	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah Tersosialisasi Program Bangsa Kencana KKBPK	persen	100	567.600.000,00	25	33.884.482	50	62.496.638	100	102.425.336	100	315.831.596	100	514.638.052	100	90,66914235	200	914.424.161,00	100	56,26218369	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Unit Pemberi Layanan Yang Sudah Tersosialisasi Program KKBPK	unit	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	153,00	69.660.500,00	100,00	59,61	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.01.07		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen: Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	dokumen	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1	0	0	0,00	2,00	3.110.000,00	33,33	0,88	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.01.023		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0,00		66.550.500,00	-	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data	dokumen	1	567.600.000,00	1	33.884.482	1	62.496.638	1	102.425.336	1	315.831.596	1,00	514.638.052,00	100	90,67	2,00	844.763.661,00	3,45	66,55	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.2.2.02.3		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen - Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	dokumen	50	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.02.09		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	laporan	18	60.000.000	18	3.410.900	18	7.333.500	18	22.098.750	18	7.322.000	18,00	40.165.150	100	66,94191667	18,00	87.890.759,00	105,88	125,56	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.02.11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	dokumen	1	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	18	291.600.000	18	-	18	18.100.000	18	25.700.000	18	245.700.000	18	289.900.000	100	99,28	18,00	369.800.000,00	-	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.02.2.02.13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	dokumen	12	216.000.000	3	30.473.582,00	3	37.063.138,00	3	54.626.586	3	62.809.596	3,00	184.972.902	25	85,64	6,00	397.072.902,00	0	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
									0															
2.14.03	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmet Need ber-KB	persen	9,6	4.067.581.000	7,6	106.711.400	7,4	721.746.424	8	1.149.152.000	7,91	1.157.831.000	8	3.135.440.824	119	77,08367268	17	8.502.322.017	119	14,66293625	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai Penyuluah yang terfasilitasi	balai penyuluah	18	1.181.630.000	18,00	98.261.400	0,00	176.120.504	18	389.867.000	0	352.170.000	18,00	996.419.324	100	84,33	36,00	2.091.504.617,00	200,00	9,28	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	0	0	0	-	0	0	164	-	-	164,00	0	0	0	0,00	196,00	-	119,51	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.01.014		Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	organisasi	32	292.000.000	32	59.111.400	32	97.912.594	-	32	48.520.000	32	205.943.994	100	82			389.378.294	NDIV/01	-	Kepala Bidang K3 dan Advokasi	
2.14.3.2.01.13		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	dokumen	18	0	0	0	0	0	3	-	-	-	3	0	17	0,00	4,00	-	66,67	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.09.2.14.3.2.01.3		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Uhl Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	lembaga	18	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0,00	18,00	-	100,00	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).																								

2.14.03.2.01.04		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dokumen		18	100.000.000	18	6.000.000	18	391.830	18	-	18	-	18	6.391.830	100	6,39	19,00	68.419.740,00	105,56	19,37	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilik)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga kencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilik)	laporan		18	360.000.000,00	18	24.750.000	18	-	18	216.125.000	18	118.750.000	18	369.825.000	100	99,90	19,00	628.128.197,00	8	49,66	Kepala Bidang KS dan Advokasi	
2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	laporan		18	471.630.000	18	8.400.000	18	77.816.500	0	153.742.000	18	184.900.000	18	424.858.500	100	90,08	36,00	1.005.578.386,00	33,33	6,04	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.01.08		Pengendalian Program KKBP/K	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP/K	dokumen		18	0	0	0	0	18	-	-	-	-	18	0	100	0,00	18,00	-	100,00	-	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Balai Penyuluh yang ter	balai penyuluh	18		747.600.000,00	0	-	18	145.320.000	18	289.380.000,00	-	290.430.000	18	725.130.000	100	96,99	36,00	2.203.670.000,00		33,09	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.02.01		Facilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Organisasi yang Mengikut Pembinaan BMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	0		0	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0,00	0,00	630.000.000,00	-		Kepala Bidang Daiduk dan KB	DAK tidak ada target Renstra	
2.14.03.2.02.04		Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikut Penggerakan Kader Institut Masyarakat Pedesaan (IMP)	orang		18	747.600.000	0	-	396	145.320.000	396	289.380.000	396	290.430.000	0	725.130.000	0	96,99	396,00	1.573.670.000,00	100,00	23,57	Kepala Bidang Daiduk dan KB	
2.14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah akseptor MKJP yang dilayani	akseptor	2000		1.423.931.000,00	1295	5.930.000	2813	299.865.500	4046	348.385.000	-	215.005.000	8.154	829.185.500	326	58,23	13173,00	2.935.098.800,00	82,85	14,01	Kepala Bidang Daiduk dan KB	

2.14.03.2.03.01			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	18		0	18	0		0	0		18	-		-	18		0	100		0,00	36,00		-	200,00	-	Kepala Bidang Dukung dan KB		
2.14.03.2.03.03			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	orang	2500		1.410.431.000	1295		5.930.000	1750		248.510.000,00	1019	346.270.000	706		215.005.000	4.770		815.715.000	191	57,83	9789,00		1.640.208.300,00	65,26	13,86	Kepala Bidang Dukung dan KB		
2.14.03.2.03.06			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	unit	0		-	0	0		0	0			-		-	0		0	0		0,00	0,00		1.281.420.000,00	-	15,47	Kepala Bidang Dukung dan KB		
2.14.03.2.03.08			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	laporan	55		13.500.000	0		-	73		11.355.500	73	2.115.000	73		-	0		13.470.500	0		0,00	0,00		13.470.500,00	-	18,11	Kepala Bidang Dukung dan KB	
2.14.03.2.04			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yg berkontribusi terhadap pembangunan di wilayahnya	Kampung KB	190		714.420.000,00	0		2.520.000	190		140.440.000	356	141.520.000	0		300.226.000	356		584.706.000	187	81,84	712,00		1.272.048.600,00	1.343,40	16,24	Kepala Bidang Dukung dan KB		
2.14.03.2.04.01			Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang mendukung penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber- KB	Organisasi	16		0	0		-	0		-		-		-	0		0	0		0,00	0,00		-	-	-	Kepala Bidang Dukung dan KB		
2.14.03.2.04.02			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	0		0	0	0		0	0			-	0		-	356		0	0		0,00	712,00		10.000.000,00	-	-	Kepala Bidang Dukung dan KB	
2.14.03.2.04.03			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung	190		714.420.000	0		2.520.000	0		140400000	356	141.520.000	356		300.226.000	0		584.706.000	0		0,00	0,00		1.262.048.600,00	-	34,51	Kepala Bidang Dukung dan KB	
																											-					
																											-					
2.14.04	Peningkatan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan Daerah, inisiasi nilai-nilai luhur budaya Gresik, dan pembinaan karakter	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pembinu Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri	persen	9		9.418.339.000,00	9		48.690.000	0		1.884.850.000	0	2.975.220.000	0		4.345.988.538	9		9.255.758.538	100	98,274	18,11		18.290.346.238,00		61,739543	Kepala Bidang KS dan Advokasi			
2.14.04.2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS) yang difasilitasi dengan sarana, pelatihan dan orientasi teknis	kelompok	7		2.752.339.000,00	7,00		23.490.000,00	7,00		586.850.000,00	7	642.020.000	0		1.337.398.538	7		2.589.758.538	100	94,09	14,00		5.265.076.238,00	200,00	17,78	Kepala Bidang KS dan Advokasi			
2.14.04.2.01.02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Keluarga Sejahtera (PPKS)	unit	18		130.000.000	18		-	18		-		-	18		104.993.790	18		104.993.790	0		0,00	18,00		104.993.790,00	100,00	7,39	Kepala Bidang KS dan Advokasi		
2.14.04.2.01.03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	laporan	0		0	0	0		0	0			-			-	0		0	0		0,00	0,00		-	-	-	Kepala Bidang KS dan Advokasi		
2.14.04.2.01.04		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	orang	187		0	0		-	0		-		-			-	0		0	0		0,00	187,00		-	25,00	-	Kepala Bidang KS dan Advokasi		
2.14.04.2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi KeluargaUPPKS)	orang	0		0	2020		-	0		-		-			-	2020		0	0		0,00	5840,00		-	200,00	-	Kepala Bidang KS dan Advokasi		

2.14.04.2.01.06		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapatkan biaya operasional	kelompok		0	0	0	0	0	-		-	0	0	0,00	0,00	-	-	Kepala Bidang KS dan Advokasi																				
2.14.04.2.01.0017		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	laporan	54	746.069.000	54	23.490.000	54	127170000	54	174.990.000	54	310.680.000	54	636.330.000	100	0,00	54,00	636.330.000,00	180,00	119,41	Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.01.08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	laporan	0	0	0	0	0	-	0	-		-	0	0	0,00	10,00	96.940.000,00	166,67	13,90	Kepala Bidang KS dan Advokasi																		
2.14.04.2.01.016		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	5	48.000.000			5	11.000.000	5	18.350.000	5	4.764.748	5	34.114.748	100	71,07		50.710.348,00	-	-	Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.01.024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	orang	0	1.528.270.000			2920	448.680.000,00	2920	448.680.000	2920	916.960.000	2920	1.814.320.000	0	99,24		4.069.627.600,00			Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.01.026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	kelompok	0	-			-	-	0	-	0	-	-	0	0	0,00		74.724.500,00			Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah desa dan kelurahan yang terfasilitasi TPK dan akses internet mobile	Desa / Kelurahan	356	6.666.000.000,00	356	26.200.000,00	356	1.298.000.000,00	356	2.333.200.000	356	3.068.600.000	356	6.666.000.000,00	100	100,00		13.025.270.000,00			Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.02.0005		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Laporan	18	3.030.000.000	18	26.200.000	18	934.400.000,00	18	878.800.000	18	1.190.600.000	18	3.030.000.000	100	100,00		6.059.900.000,00			Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
2.14.04.2.02.06		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Ketahanan Dokumen Keluarga Hasil Melalui Pengelolaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	laporan	18	3.636.000.000	18		18	363.600.000,00	18	1.454.400.000	18	1.818.000.000	18	3.636.000.000	100	100,00		6.965.370.000,00			Kepala Bidang KS dan Advokasi																	
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program																																								
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)																-	90,49		129,33	245,48																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM...)																ST	ST		ST	ST																				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	Terdapat dana DAK yang bisa digunakan selama triwulan 1, sehingga sebagian kegiatan bisa terlaksana
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	Pembatasan pencairan anggaran selama triwulan 1, sehingga sebagian besar kegiatan ditunda pelaksanaannya
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal sehingga tidak terjadi penundaan lebih jauh
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD tahun berikutnya :	perencanaan kegiatan berkelanjutan untuk mencapai target sesuai RPJMD

N o.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	Keterangan
1	ST 91% ≤ 100%	Nama Urusan
2	T 76% ≤ 90%	Nama Instansi
3	S 66% ≤ 75%	Capaian Kinerja Per
4	R 51% ≤ 65%	Total Rata-rata capaian kinerja dari seluruh
5	SR ≤ 50%	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN

Kinerja
122,8
104,8

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Disetujui
Gresik, Januari 2026
Kepala Dinas KB, PP dan PA
Kecamatan Gresik

TETI ERNAWATI, M.H.
Pemula Utama Muda
00701 2 010